

Multikulturalisme Sebagai Realitas Sosial dan Historis Indonesia



Aji Prasetyo Panigoro¹ , Fery Diantoro² , Azzura Tera Rosalinda³ , Sekar Fitri Maharani⁴

^{1,2,3,4}UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

ajiprasetyopanigoro@gmail.com

History:

Submitted: 11-06-2026

Revised: 15-06-2026

Accepted: 22-06-2026

Keyword:

multiculturalism, social reality, historical reality

Kata Kunci:

multikulturalisme, realitas sosial, realitas sejarah



Copyright © 2026 by Riset.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.66914/riset>

Abstract

Multiculturalism is a social and historical reality inherent in Indonesia's national development. This article examines the emergence of multiculturalism prior to independence through maritime trade networks and colonial interactions that brought together diverse ethnicities, religions, and cultures across the archipelago. These historical processes shaped a pluralistic social structure and laid the foundation for Indonesia's national identity. Ethnic, religious, racial, and cultural diversity has since become a demographic fact, reflected in hundreds of ethnic groups, local languages, and living traditions coexisting throughout the country. Normatively, the national motto emphasizes unity in diversity as the guiding principle for managing pluralism. However, diversity also presents challenges, including identity-based social conflicts that may threaten social cohesion. Therefore, multicultural education is essential to foster tolerance, dialogue, and mutual respect in order to strengthen national integration and promote a harmonious and democratic society.

Abstrak

Multikulturalisme merupakan realitas sosial dan historis yang melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Artikel ini membahas kemunculan multikulturalisme sebelum kemerdekaan melalui interaksi perdagangan maritim dan kolonialisme yang mempertemukan beragam etnis, agama, dan budaya di Nusantara. Proses historis tersebut membentuk struktur masyarakat yang majemuk dan menjadi fondasi identitas kebangsaan. Keragaman suku, agama, ras, dan budaya selanjutnya berkembang sebagai fakta demografis nasional yang tercermin dalam ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, serta tradisi lokal yang hidup berdampingan. Dalam konteks normatif, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar pengelolaan keberagaman dengan menekankan persatuan dalam perbedaan. Namun, pluralitas juga menghadirkan potensi konflik sosial berbasis identitas yang mengancam kohesi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dipandang penting untuk menanamkan nilai toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan guna memperkuat integrasi nasional serta membangun kehidupan sosial yang harmonis dan demokratis.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman sosial dan budaya terbesar di dunia. Kemajemukan tersebut tampak dalam keberadaan ratusan suku bangsa, bahasa daerah, agama, sistem kekerabatan, serta tradisi lokal yang hidup dan berkembang di berbagai wilayah kepulauan. Kondisi ini menegaskan bahwa multikulturalisme bukan sekadar konsep normatif, melainkan realitas sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara historis, pembentukan masyarakat majemuk telah berlangsung sejak masa prasejarah melalui migrasi antarpulau, berkembang pada era kerajaan-kerajaan maritim, dan semakin kompleks pada masa kolonial ketika interaksi perdagangan global mempertemukan beragam etnis dan kebudayaan.¹

Jalur perdagangan maritim Nusantara menjadi ruang perjumpaan antara masyarakat lokal dengan pedagang dari India, Arab, Tiongkok, hingga Eropa. Proses akulturasi budaya berlangsung secara dinamis melalui pertukaran ekonomi, penyebaran agama, serta pembentukan komunitas-komunitas baru di wilayah pesisir.² Pada masa kolonialisme Belanda, struktur sosial masyarakat semakin plural dengan hadirnya sistem stratifikasi rasial dan mobilitas tenaga kerja lintas wilayah. Dinamika historis tersebut memperkuat karakter multikultural Indonesia sebagai hasil interaksi panjang antarbudaya.

Dalam konteks kebangsaan modern, keragaman tersebut diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan

prinsip persatuan dalam perbedaan. Semboyan ini menjadi dasar normatif dalam pengelolaan kemajemukan sekaligus fondasi integrasi nasional.³ Namun demikian, pluralitas juga mengandung potensi konflik sosial berbasis identitas apabila tidak dikelola secara adil dan inklusif. Sejumlah peristiwa konflik komunal di berbagai daerah menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran multikultural dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi kebutuhan mendesak untuk menanamkan nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta dialog antarbudaya. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter kebangsaan yang demokratis dan berkeadaban. Dengan demikian, pengkajian multikulturalisme sebagai realitas sosial dan historis Indonesia menjadi relevan untuk memahami dinamika keberagaman sekaligus merumuskan strategi penguatan kohesi sosial di tengah tantangan globalisasi dan politik identitas kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian pustaka yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai bahan yang berbasis Pustaka seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang relevan, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan

¹Masruroh, dkk., "Pendidikan Multikultural di Indonesia: Strategi Transformasi Menuju Masyarakat Inklusi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 5, no. 4 (2025): 4913–4917.

²Toat Haryanto dan Saepudin Zuhri, "Pendidikan Multikultural di Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Toleransi dan Pemahaman Antar Budaya," *Syaikhona: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 15–18.

³Dewi Anandita Khifadlul Khilmi dkk., "Multikulturalisme dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia," *Journal Sains Student Research* 2, no. 2 (2024): 120–134.

⁴Fadil Mas'ud dkk., "Multikulturalisme di Indonesia: Analisis Toleransi dan Konflik Sosial dalam Masyarakat Beragam," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2026): 250–256.

metode/teknik tertentu untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.⁵ Pada artikel ini penulis akan menyajikan Multikulturalisme Sebagai Realitas Sosial dan Historis Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kemunculan Multikulturalisme Sebelum Kemerdekaan (Interaksi Kolonial dan Perdagangan)

Sebelum pembukaan perkebunan tembakau di Deli, wilayah Sumatera Timur telah dihuni oleh masyarakat Melayu pesisir yang sebagian besar merupakan keturunan Minangkabau. Sejak abad ke-17 kawasan ini juga didatangi berbagai pendatang seperti India, pelaut dari Malabar dan Koromandel, serta migran dari Aceh, Jawa, Borneo, Sulawesi, Semenanjung Melayu, Riau, dan Lingga. Arus migrasi pada masa itu masih berlangsung secara terbatas dan belum membentuk perubahan demografis yang besar.

Perubahan signifikan terjadi ketika perkebunan tembakau dibuka pada masa kolonial. Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar mendorong perekrutan buruh dari luar Sumatera Timur. Pada tahap awal, buruh Tionghoa menjadi kelompok tenaga kerja terbesar di perkebunan karena dianggap terampil dan berpengalaman.

Namun, sejak awal abad ke-20 jumlah buruh Tionghoa mulai berkurang akibat kebijakan pajak tinggi dari pemerintah kolonial Belanda terhadap perekrutan mereka. Para pemilik perkebunan kemudian beralih merekrut buruh dari Jawa yang dinilai lebih murah dari segi upah dan biaya transportasi. Kondisi ekonomi di Jawa yang memburuk juga membuat banyak orang bersedia bekerja sebagai kuli kontrak di Deli.

Buruh India tidak berkembang sebanyak Tionghoa dan Jawa karena adanya

pembatasan pengiriman tenaga kerja oleh pemerintah kolonial Inggris. Sementara itu, dari wilayah Sumatera Timur sendiri, orang Batak cukup banyak terlibat sebagai tenaga kerja, sedangkan kelompok lain jumlahnya lebih kecil. Komposisi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola perekrutan buruh berdasarkan kebijakan dan pertimbangan ekonomi.⁶

Pembukaan perkebunan juga melahirkan struktur sosial yang hierarkis. Golongan Eropa menempati posisi teratas sebagai administrator, pemilik modal, dan pengelola kebun. Di bawahnya terdapat pegawai staf dan nonstaf, sedangkan buruh perkebunan yang berasal dari berbagai etnis menempati lapisan paling bawah. Selain itu, terdapat pula penguasa lokal seperti sultan yang memiliki tanah perkebunan.

Pembagian kerja di perkebunan sering kali didasarkan pada etnis. Orang Jawa banyak ditempatkan pada pekerjaan kasar seperti menggali tanah dan membuat jalan, orang Keling pada pekerjaan drainase, orang Banjar dan Siam membangun lumbung, Melayu menjadi kusir, Batak menebang hutan, sedangkan pekerja utama di banyak kebun tetap didominasi Tionghoa. Pola ini memperkuat stereotipe etnis dan menumbuhkan praktik rasialisme dalam kehidupan perkebunan.

Kehidupan buruh diatur secara ketat melalui peraturan seperti Koeli Ordonantie yang menetapkan jam kerja panjang dari pagi hingga sore dengan waktu istirahat terbatas. Hari libur hampir tidak ada kecuali saat penerimaan upah, dan pada hari tersebut pun buruh sering diberi pekerjaan tambahan tanpa bayaran. Situasi ini membuat para kuli hidup dalam tekanan dan keterbatasan kebebasan.

Pemilik perkebunan memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan menjalankan mekanisme "pengadilan"

⁵ Mhd Habibu Rahman, "Metode Mendidik Akhlak Anak Dalam Pespektif Imam Al-Ghazali," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (December 11, 2019): 30, <https://doi.org/10.24235/EQUALITA.V1I2.5459>.

⁶Roni Lukman, *Membangun Tradisi Multikulturalisme di Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional* (Gorontalo: Ideals Publishing, 2020), 68-77.

sendiri untuk menghukum buruh yang dianggap melanggar aturan. Sistem ini menjadikan perkebunan seperti wilayah tertutup dengan kontrol penuh atas tenaga kerja. Para kuli kontrak berada dalam posisi yang lemah dan kerap menerima perlakuan keras demi menjaga stabilitas produksi.

Dampak perkembangan perkebunan turut mendorong pertumbuhan Kota Medan sebagai pusat ekonomi dan administrasi. Perekrutan buruh dari berbagai daerah memperkaya komposisi etnis kota ini, yang dihuni oleh Melayu, Batak (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing-Angkola, Pakpak), Aceh, Jawa, Minang, Tamil, Tionghoa, Banjar, dan lainnya. Keberagaman tersebut terlihat dalam tradisi budaya, bahasa, agama, rumah ibadah, serta kawasan seperti Kampung Keling (Little India) dan Pasar Hongkong yang menjadi bagian dari sejarah sosial kota.⁷

Dengan demikian, dinamika migrasi dan sistem perkebunan kolonial di Sumatera Timur tidak hanya membentuk stratifikasi sosial yang kuat, tetapi juga melahirkan masyarakat yang majemuk. Kota Medan kemudian dikenal sebagai “negeri berbilang kaum” karena keberagaman suku, ras, agama, dan budaya yang telah tumbuh sejak masa kolonial dan tetap terpelihara hingga kini dalam kehidupan sosial yang relatif harmonis.

Multikulturalisme Indonesia telah tumbuh jauh sebelum kemerdekaan, terutama melalui jalur perdagangan maritim dan interaksi kolonial yang berlangsung selama berabad-abad. Sejak masa prasejarah dan protosejarah, kawasan kepulauan Indo-Melayu telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Posisi geografis Nusantara yang strategis—terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya titik temu berbagai bangsa. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia sejak awal berkembang sebagai ruang perjumpaan

budaya yang dinamis, tempat terjadinya pertukaran gagasan, nilai, dan tradisi.

Pada sekitar abad ke-4 hingga ke-5 Masehi, aktivitas perdagangan semakin berkembang dengan hadirnya pedagang Arab dan Tiongkok, terutama pada masa kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Hubungan dagang tersebut tidak semata-mata berorientasi pada komoditas seperti rempah-rempah, tetapi juga membuka jalur masuknya agama, bahasa, teknologi pelayaran, serta kebiasaan sosial baru. Interaksi yang intens ini melahirkan proses akulturasi budaya yang berlangsung secara alami. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima pengaruh, melainkan juga berperan aktif dalam mengolah dan menyesuaikan unsur-unsur asing dengan karakter budaya setempat, sehingga terbentuk identitas sosial yang semakin beragam.⁸

Memasuki abad ke-16 dan ke-17, arus perdagangan semakin kompetitif dengan datangnya bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada awalnya, kedatangan mereka bertujuan menguasai perdagangan rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasar dunia. Namun, persaingan dagang tersebut berkembang menjadi praktik kolonialisme yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi di Nusantara. Kolonialisme menggeser orientasi ekonomi menjadi berbasis ekspor dan eksploitasi sumber daya, sekaligus memperkenalkan sistem hukum, pendidikan Barat, serta birokrasi modern.

Perubahan tersebut berdampak signifikan terhadap struktur sosial masyarakat. Kolonialisme melahirkan stratifikasi sosial yang membedakan masyarakat berdasarkan ras dan kepentingan ekonomi. Diskriminasi dan ketimpangan menjadi bagian dari realitas sosial pada masa

⁷Rosmaida Sinaga, dkk., *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan* (Yayasan Kita Menulis, 2020)

⁸Zulkifli Mappasomba, “Diplomasi Niaga dan Arus Kebudayaan Indonesia (*Commercial Diplomacy and the Flow of Indonesian Culture*),” *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 4, no. 2 (2023): 115–132.

itu. Meski demikian, di tengah sistem yang tidak setara tersebut, interaksi antar kelompok etnis tetap berlangsung. Pelabuhan, pusat perdagangan, dan kota-kota kolonial menjadi ruang kosmopolitan tempat berbagai komunitas hidup berdampingan dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, pertemuan antara budaya Arab, Tiongkok, India, Eropa, dan budaya lokal justru memperkaya khazanah kebudayaan Indonesia. Proses hibridisasi tampak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni dan arsitektur hingga bahasa dan kuliner. Banyak unsur budaya asing yang diadaptasi dan dipadukan dengan tradisi lokal, menghasilkan bentuk-bentuk budaya baru yang unik. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara memiliki daya lentur budaya yang kuat dan kemampuan tinggi dalam menyerap serta mentransformasikan pengaruh luar menjadi bagian dari identitasnya sendiri. Perdagangan rempah-rempah selama berabad-abad pada akhirnya tidak hanya membangun jaringan ekonomi global, tetapi juga menciptakan jalur diplomasi budaya yang memperkuat sikap toleransi dan keterbukaan antar kelompok.⁹

Dengan demikian, multikulturalisme Indonesia bukanlah konsep yang muncul secara tiba-tiba setelah kemerdekaan, melainkan hasil dari proses historis panjang yang melibatkan perdagangan, migrasi, dan kolonialisme. Keberagaman etnis, agama, dan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia saat ini merupakan warisan sejarah dari arus niaga dan perjumpaan budaya global yang telah berlangsung jauh sebelum lahirnya negara Indonesia merdeka.

Keragaman Suku, Agama, Ras, dan Budaya sebagai Fakta Demografis Nasional

Indonesia sejak awal pembentukannya lahir dan berkembang dalam kondisi

masyarakat yang beragam. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya bukanlah hasil dari proses modern semata, melainkan telah menjadi karakter sosial masyarakat Nusantara jauh sebelum lahirnya negara Indonesia. Kondisi ini menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural secara historis dan sosiologis.

Secara demografis, keberagaman tersebut melahirkan susunan kehidupan sosial yang beraneka ragam. Masing-masing kelompok masyarakat membawa identitas, nilai, dan sistem budaya yang beragam, namun tetap berada dalam satu ruang politik yang sama. Kondisi ini menuntut tumbuhnya kesadaran bersama untuk mengelola perbedaan secara baik dan benar, sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Dalam perspektif multikulturalisme, keberagaman tidak dipahami sebagai ancaman terhadap persatuan, tetapi sebagai fakta objektif yang harus diakui dan dihargai. Oleh karena itu, pengakuan atas keberagaman demografis merupakan landasan utama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹⁰

1. Keragaman Suku Bangsa di Indonesia

Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Letak Indonesia sebagai negara kepulauan turut memengaruhi munculnya kelompok-kelompok etnik dengan karakter khas di setiap wilayah. Kondisi ini menjadikan keberagaman suku sebagai bagian yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Setiap suku bangsa memiliki nilai, adat, dan aturan sosial yang mengatur kehidupan bersama anggotanya. Keberagaman tersebut memperkaya budaya nasional serta memperkuat

⁹Ahmadin, "Perdagangan Maritim dan Interaksi Budaya di Nusantara Abad XV–XVII," *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 15, no. 2 (2023): 101–118.

¹⁰Suroyo dkk., *Development of Multiculturalism on Ethnic and Religion in Indonesia*, (Banyuwangi, Indonesia) 7, no. 1 (2023): 21–35, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2>.

identitas lokal di berbagai daerah. Dalam lingkup yang lebih luas, identitas suku ini ikut berperan dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia.

Di sisi lain, perbedaan antar suku juga dapat memicu konflik sosial apabila tidak disertai sikap saling menghargai. Karena itu, pemahaman terhadap keberagaman suku bangsa perlu dibarengi dengan penanaman nilai persatuan dan kesetaraan antarwarga negara.¹¹

2. Keragaman Agama dan Kepercayaan

Indonesia memiliki keragaman agama yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, seperti interaksi perdagangan, penyebaran ajaran agama, dan pertukaran budaya. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha hidup berdampingan dengan kepercayaan lokal yang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman agama merupakan bagian nyata dari kehidupan sosial bangsa Indonesia.

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber nilai moral maupun sebagai pedoman dalam berinteraksi sosial. Ajaran dan praktik keagamaan turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, hubungan sosial, serta rasa kebersamaan antarindividu dan kelompok.

Di samping agama-agama resmi, berbagai aliran kepercayaan dan tradisi spiritual lokal juga menjadi bagian dari keragaman religius di Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan kepercayaan tersebut mencerminkan sikap bangsa Indonesia yang menghargai

perbedaan keyakinan sebagai bagian dari realitas demografis nasional.¹²

3. Keragaman Ras dan Etnis

Keragaman ras dan etnis di Indonesia terbentuk melalui proses migrasi dan percampuran penduduk yang berlangsung sejak lama. Posisi Indonesia yang strategis dalam jalur perdagangan dunia menjadikannya wilayah pertemuan berbagai kelompok ras dan etnis. Proses ini membentuk masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari sisi biologis maupun sosial.

Interaksi antar ras dan antar etnis terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan ras sering kali menyatu dan membentuk identitas kebangsaan yang terbuka serta inklusif.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah Indonesia juga pernah muncul ketegangan dan praktik diskriminasi terhadap ras. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemahaman multikultural agar perbedaan ras tidak dijadikan alasan untuk pemisahan sosial, melainkan dipahami sebagai bagian dari kenyataan demografis bangsa.¹³

4. Keragaman Budaya Nasional

Budaya di Indonesia merupakan wujud hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat yang beragam. Setiap daerah memiliki ciri budaya tersendiri, seperti bahasa, kesenian, tradisi, serta pengetahuan lokal. Keberagaman budaya tersebut menjadi salah satu kekayaan nasional yang sangat bernilai.

Selain sebagai identitas daerah, budaya juga berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Melalui budaya, nilai toleransi, kebersamaan, dan semangat

¹¹Munawaroh Munawaroh dan Akhmad Khoiri, "HOW'S STUDENT CHARACTER IN DIGITAL ERA? A COMPREHENSIVE STUDY OF PAI TEACHERS ROLE IN SHAPING STUDENTS'RELIGIOUS CHARACTER," *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam* 9, no. 2 (2025): 127–41.

¹²Dewi Anandita Khifadlul Khilmi dkk., "Multikulturalisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia," *Journal Sains Student Research* 2, no. 2 (2024): 167–72.

¹³Siti Halisyia Parapat dkk., "Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* (Riau, Indonesia) 8, no. 1 (2024): 1255–61.

gotong royong dapat terus diwariskan antar generasi. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.

Di era globalisasi, budaya lokal menghadapi tantangan berupa penyamaan budaya dan perubahan nilai. Situasi ini menuntut adanya kesadaran kolektif untuk menjaga dan mengembangkan budaya sebagai bagian dari realitas demografis sekaligus jati diri nasional Indonesia.¹⁴

5. Keragaman sebagai Fakta Demografis yang Tak Terpisahkan

Keragaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Keberagaman tersebut terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan berkembang secara alami seiring perjalanan masyarakat Nusantara.

Menolak keberagaman justru dapat memicu konflik sosial dan melemahkan persatuan bangsa. Sebaliknya, sikap menerima dan mengakui pluralitas menjadi syarat penting untuk mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan demokratis.

Dengan demikian, keragaman perlu dipandang sebagai kekuatan nasional. Pemahaman terhadap keragaman sebagai fakta demografis memungkinkan masyarakat Indonesia membangun persatuan yang didasarkan pada nilai kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati.¹⁵

Bhinneka Tunggal Ika sebagai Dasar Normatif Pengelolaan Keberagaman 1. Asal Usul dan Makna Filosofis *Bhinneka Tunggal Ika*

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* diambil dari kitab kakawin *Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad ke-14. Makna filosofisnya adalah “berbedabeda tetapi tetap satu jua”, yang merefleksikan pemahaman bahwa perbedaan identitas budaya, agama, dan suku tidak harus menjadi penghambat persatuan, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan kesatuan bangsa. Dalam kajian pendidikan kewarganegaraan kontemporer, *Bhinneka Tunggal Ika* dipahami sebagai nilai dasar pemersatu bangsa yang memberi legitimasi moral bagi negara untuk menjaga kerukunan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.¹⁶

Sementara itu, buku *Pluralisme dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia* menegaskan bahwa semboyan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diaktualisasikan dalam praktik sosial melalui penghormatan terhadap perbedaan.¹⁷

2. Fungsi Normatif dalam Konteks Negara Hukum

Dalam konteks konstitusional, *Bhinneka Tunggal Ika* berfungsi sebagai prinsip dasar tata nilai negara yang menjadi referensi normatif dalam menyusun kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan yang menyentuh aspek keberagaman (misalnya hak beragama, perlindungan budaya, dan kebijakan sosial) harus menghormati prinsip persatuan dalam keberagaman.

Menurut penelitian dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, nilai *Bhinneka* menyebabkan hukum dan kebijakan

¹⁴ Yusup Agus Setiono, “Peran Agama dan Pendidikan dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022): 88–104.

¹⁵ Ilham Saputra dkk., *Multikulturalisme dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia*, (Riau, Indonesia) 9, no. 3 (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai): 30778–86.

¹⁶ Aminudin, *Pluralisme dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 45–53.

¹⁷ Aminudin, *Pluralisme dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 110–117.

publik diarahkan untuk menjamin kesetaraan semua kelompok dalam masyarakat tanpa diskriminasi.¹⁸ Di sini, semboyan menjadi dasar normatif yang memberi justifikasi terhadap kebijakan yang pro-inklusi.

3. Peran Nilai *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Pendidikan Multikultural

Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya relevan dalam ranah hukum, tetapi juga merupakan landasan pedagogis pendidikan multikultural di sekolah dan universitas. Pendidikan multikultural yang efektif mendorong siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan serta membangun empati positif terhadap keragaman sosial.

Penelitian di *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* menemukan bahwa nilai toleransi, saling menghargai, dan pluralisme—yang bersumber dari semboyan *Bhinneka*—menjadi kriteria evaluatif utama dalam kurikulum kewarganegaraan yang inklusif.¹⁹ Sebagai contoh, pendekatan pembelajaran yang berbasis nilai ini membantu siswa memahami bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan sosial yang memperkaya kehidupan berbangsa.

4. Aktualisasi Nilai Normatif dalam Pengelolaan Konflik Sosial

Konflik sosial berbasis identitas seperti suku atau agama seringkali berakar dari ketidaksetaraan atau prasangka sosial. Dalam kajian sosiologi, *Bhinneka Tunggal Ika* dipandang sebagai alat normatif untuk mencegah eksklusi sosial dan diskriminasi, baik di tingkat kebijakan maupun kehidupan sehari-hari.

Sebagai landasan normatif, semboyan ini memberi ruang bagi dialog

antar kelompok untuk mencari solusi bersama tanpa meminggirkan identitas tertentu. Penelitian di *Jurnal Sosiologi Indonesia* menunjukkan bahwa komunitas yang aktif menanamkan nilai *Bhinneka* cenderung lebih mampu meredam konflik identitas dan membangun kohesi sosial.²⁰

5. Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi Nilai Normatif

Meskipun nilai *Bhinneka Tunggal Ika* sudah diakui secara normatif dalam konstitusi dan praktik pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

a. Eksklusivitas sosial: stigma dan stereotip terhadap kelompok minoritas terkadang masih muncul dalam wacana sosial dan media.

b. Kesenjangan implementasi kebijakan: peraturan yang bersifat normatif belum selalu diikuti dengan penciptaan lingkungan sosial yang aman dan inklusif.

c. Kurangnya pemahaman pluralisme: sebagian masyarakat memahami pluralisme hanya secara dangkal tanpa ditopang dialog mendalam.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa perlu adanya komitmen kontinu dari pemerintah, pendidik, dan masyarakat luas untuk menerjemahkan semboyan ini menjadi praktik nyata dalam kehidupan berbangsa.

Konflik Sosial Berbasis Identitas sebagai Latar Urgensi Pendidikan Multikultural

1. Pengertian Konflik Sosial Berbasis Identitas

Konflik sosial berbasis identitas adalah benturan sosial yang muncul dari

¹⁸Putra, "Implementasi *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Kebijakan Publik Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 2 (2022), hlm. 235–247.

¹⁹Sari & Kartini, "Nilai Multikultural dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10 No. 1 (2023), hlm. 78–92.

²⁰Wardani, "Resolusi Konflik Sosial Melalui Nilai *Bhinneka Tunggal Ika*", *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 15 No. 3 (2024), hlm. 310–325.

perbedaan kelompok berdasarkan identitas yang melekat, seperti suku, agama, ras, bahasa, budaya, dan orientasi sosial lainnya. Konflik ini tidak semata karena perbedaan itu sendiri, tetapi karena perbedaan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keberadaan kelompok tertentu.²¹

Secara lebih mendalam, dalam *Jurnal Sosiologi & Kemasyarakatan*, konflik identitas dijelaskan sebagai kondisi di mana aksi kelompok dipicu oleh persepsi ketidakadilan, marginalisasi struktural, atau kecenderungan stereotip negatif terhadap kelompok lain, sehingga memicu reaksi yang mempertegas batas “kami vs mereka”.²²

2. Faktor Penyebab Konflik Identitas

a. Ketimpangan Struktural

Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya sering menjadi basis konflik. Ketika suatu kelompok merasa terpinggirkan secara ekonomi atau sosial, solidaritas identitas sering digunakan untuk menggali kekuatan kolektif, yang bisa memicu persaingan atau benturan dengan kelompok lain.²³

Misalnya, dalam konteks daerah yang memiliki kelompok etnis minoritas yang mengalami kesenjangan kesejahteraan, ketidakpuasan sosial sering berujung pada pembentukan identitas kelompok yang eksklusif dan menuntut perubahan sosial besar-besaran.

b. Diskriminasi Normatif dan Sosial

Diskriminasi terhadap kelompok tertentu—baik dalam pelayanan publik, kesempatan kerja, maupun representasi politik—menyebabkan perasaan tidak adil yang mendalam. Diskriminasi ini menguatkan sentimen identitas dan memperlemah solidaritas sosial.²⁴

Dalam *Jurnal HAM Indonesia*, Santoso (2020) mencatat bahwa bentuk diskriminasi struktural sering kali tidak hanya memengaruhi hak ekonomi tetapi juga menciptakan stigma sosial yang mendalam terhadap kelompok yang terdampak.

c. Politik Identitas dan Polarisasi Sosial

Politik identitas adalah strategi mobilisasi politik yang menggunakan perbedaan identitas sebagai alat untuk mendapatkan dukungan atau kekuasaan. Ketika perbedaan suku atau agama dipolitisasi, hal ini dapat memperkuat persepsi sekat dan memperkecil ruang dialog, sehingga polarisasi sosial meningkat tajam.²⁵

Misalnya, kampanye politik yang mengeksploitasi sentimen agama atau etnis untuk memenangkan pemilihan dapat memperburuk hubungan antarkelompok jika tidak dikelola secara sehat.

3. Dampak Konflik Identitas terhadap Kehidupan Sosial dan Negara

Konflik berbasis identitas memiliki dampak yang luas, baik terhadap individu, komunitas, maupun struktur sosial secara keseluruhan.

a. Fragmentasi Sosial

²¹Nurhayati, A. (2022). *Identitas dan konflik sosial di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi & Kemasyarakatan*, 8(2), 112–130.

²²Hidayat, R. (2021). *Pluralisme dan dinamika sosial*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

²³Santoso, D. (2020). Diskriminasi sosial dan konflik antar kelompok. *Jurnal HAM Indonesia*, 7(1), 23–39.

²⁴Siregar, M. (2023). Ketimpangan ekonomi sebagai pemicu konflik identitas. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*, 15(1), 55–69.

²⁵Yuliani, R. (2024). Politik identitas dan fragmentasi sosial. *Jurnal Politik & Studi Kebangsaan*, 11(4), 201–221.

Ketika masyarakat terpecah menurut garis identitas, hubungan sosial yang semula bersifat inklusif menjadi eksklusif, menghasilkan segregasi sosial dan perpecahan komunitas.²⁶

b. Meningkatnya Intoleransi dan Kekerasan
Konflik identitas berpotensi berubah menjadi kekerasan komunal bila sentimen kelompok berubah menjadi tindakan fisik. Hal ini tidak hanya memengaruhi korban langsung tetapi juga memperdalam trauma sosial kelembagaan.⁸

c. Menurunkan Kepercayaan pada Lembaga Negara

Ketika masyarakat merasa institusi negara tidak adil dalam menangani konflik identitas, kepercayaan publik terhadap aparat hukum atau pemerintah melemah.⁹

4. Urgensi Pendidikan Multikultural sebagai Solusi Preventif dan Transformasional

Karena konflik identitas menunjukkan kegagalan pemahaman sosial terhadap keberagaman, pendidikan multikultural menjadi kebutuhan penting dalam mencegah dan mengatasi konflik tersebut.

Dalam *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*, pendidikan multikultural dijelaskan sebagai bentuk pendidikan yang tidak hanya mengajarkan toleransi, tetapi juga menanamkan nilai keadilan, empati, dialog, dan keterampilan antarbudaya dalam kehidupan sosial.¹⁰

a. Fungsi Pendidikan Multikultural:

- 1) Mengembangkan Kesadaran Sosial, yaitu membantu individu memahami konteks sosial kelompok B k lain.
- 2) Mengurangi Stereotip Prasangka, yaitu mendorong pendekatan kritis terhadap asumsi negatif terhadap kelompok berbeda.¹¹
- 3) Membangun Empati, artinya empati sosial merupakan kunci dalam menciptakan saling menghargai.¹²
- 4) Memperkuat Kompetensi Interkultural, artinya keterampilan berkomunikasi efektif antaridentitas adalah kunci hubungan damai.²⁷

5. Kontribusi Pendidikan Multikultural dalam Membangun Toleransi dan Kerjasama

Dengan memahami perbedaan secara positif, pendidikan multikultural tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga menguatkan solidaritas nasional. Dalam buku *Pendidikan Multikultural dalam Konteks Global*, dijelaskan bahwa pembelajaran multikultural memberikan siswa: a. Kesadaran peran sebagai warga negara plural b. Kemampuan berpikir kritis terhadap isu sosial c. Kemampuan berinteraksi secara inklusif dan adil.

Sebagai contoh, kegiatan sekolah yang melibatkan siswa dari berbagai latar budaya dalam proyek kolaboratif dapat memupuk keterbukaan dan keterlibatan sosial aktif, sehingga konflik karena prasangka dapat diminimalisir sejak dini.²⁸

²⁶Siregar, N., & Putri, L. (2022). Pendidikan multikultural dan empati sosial siswa. *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*, 5(1), 48–61.

²⁷Dewi, A. (2020). Kompetensi interkultural dalam kurikulum sekolah. *Jurnal Kurikulum & Pembelajaran*, 9(2), 85–100.

²⁸Ramadhan, I. (2024). Pendidikan multikultural dan nilai keadilan sosial. *Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 8(1), 31–45.

KESIMPULAN

Multikulturalisme di Indonesia merupakan realitas sosial dan historis yang terbentuk melalui proses panjang interaksi perdagangan, migrasi, dan kolonialisme sebelum kemerdekaan. Sejak masa kerajaan maritim hingga era kolonial, Nusantara telah menjadi ruang perjumpaan berbagai etnis, agama, dan budaya yang kemudian membentuk struktur masyarakat majemuk. Keragaman tersebut tidak hanya menjadi ciri khas bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembentukan identitas nasional.

Secara demografis, keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan fakta objektif yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajemukan ini mengandung potensi kekuatan sosial apabila dikelola dengan prinsip persatuan dan keadilan. Dalam konteks kebangsaan, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi dasar normatif yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan tanpa menghapus perbedaan. Prinsip ini menempatkan keberagaman sebagai kekayaan bangsa yang harus dirawat bersama.

Namun demikian, realitas multikultural juga menyimpan potensi konflik sosial berbasis identitas, baik etnis, agama, maupun kepentingan politik. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan memerlukan pengelolaan yang bijaksana melalui kebijakan sosial dan pendidikan yang inklusif.

Oleh karena itu, pendidikan multikultural memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, multikulturalisme di Indonesia harus dipahami bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif untuk menjaga integrasi nasional dan membangun masyarakat yang harmonis serta demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadin. "Perdagangan Maritim dan Interaksi Budaya di Nusantara Abad XV-XVII." *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 15, no. 2, 2023.
- Aminudin. *Pluralisme dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Dewi, A. "Kompetensi Interkultural dalam Kurikulum Sekolah." *Jurnal Kurikulum & Pembelajaran* 9, no. 2, 2020.
- Fauzi, M. *Pendidikan Multikultural sebagai Strategi Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Haryanto, Toat, dan Saepudin Zuhri. "Pendidikan Multikultural di Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Toleransi dan Pemahaman Antar Budaya." *Syaikhona: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1, 2025.
- Hidayat, R. *Pluralisme dan Dinamika Sosial*. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2021.
- Khilmi, Dewi Anandita Khifadlul, Rosa Agustina Findy, Putri Salsabila Isviana, dan Denny Oktavina Radianto. "Multikulturalisme dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia." *Journal Sains Student Research* 2, no. 2, 2024.
- Lukman, Roni. *Membangun Tradisi Multikulturalisme di Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. Gorontalo: Ideals Publishing, 2020.
- Mappasomba, Zulkifli. "Diplomasi Niaga dan Arus Kebudayaan Indonesia (Commercial Diplomacy and the Flow of Indonesian Culture)." *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia* 4, no. 2, 2023.
- Mas'ud, Fadil, dkk. "Multikulturalisme di Indonesia: Analisis Toleransi dan Konflik Sosial dalam Masyarakat Beragam." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4, 2026.

- Masruroh, dkk. "Pendidikan Multikultural di Indonesia: Strategi Transformasi Menuju Masyarakat Inklusi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 5, no. 4, 2025.
- Munawaroh, dan Akhmad Khoiri. "How's Student Character in Digital Era? A Comprehensive Study of PAI Teachers Role in Shaping Students' Religious Character." *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam* 9, no. 2, 2025.
- Nurhayati, A. "Identitas dan Konflik Sosial di Indonesia." *Jurnal Sosiologi & Kemasyarakatan* 8, no. 2, 2022.
- Parapat, Siti Halisyah, Ihdatul Wardah Caniago, Ikhrwati Suryani, Heppy Ariani, Taufik Hidayat Siregar, dan Eka Yusnaldi. "Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1, 2024.
- Putra, R. "Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Kebijakan Publik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2, 2022.
- Ramadhan, I. "Pendidikan Multikultural dan Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 8, no. 1, 2024.
- Santoso, D. "Diskriminasi Sosial dan Konflik Antar Kelompok." *Jurnal HAM Indonesia* 7, no. 1, 2020.
- Saputra, Ilham, Izatun Zamzamia, dan Didik Tri Setiyoko. "Multikulturalisme dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia." 9, no. 3, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Sari, D., dan L. Kartini. "Nilai Multikultural dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1, 2023.
- Setiono, Yusup Agus. "Peran Agama dan Pendidikan dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia." *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 19, no. 1, 2022.
- Sinaga, Rosmaida, dkk. *Kolonialisme Belanda dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Siregar, M. "Ketimpangan Ekonomi sebagai Pemicu Konflik Identitas." *Jurnal Ekonomi & Pembangunan* 15, no. 1, 2023.
- Siregar, N., dan L. Putri. "Pendidikan Multikultural dan Empati Sosial Siswa." *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia* 5, no. 1, 2022.
- Suroyo, Bima Maulana Putra, Yuliantoro, dan Bedriati Ibrahim. "Development of Multiculturalism on Ethnic and Religion in Indonesia." 7, no. 1, 2023.
- Wardani, F. "Resolusi Konflik Sosial melalui Nilai Bhinneka Tunggal Ika." *Jurnal Sosiologi Indonesia* 15, no. 3, 2024.
- Yuliani, R. "Politik Identitas dan Fragmentasi Sosial." *Jurnal Politik & Studi Kebangsaan* 11, no. 4, 2024.